

PENGARUH TENAGA KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN ENREKANG

Akhmad¹ Warda² Sri Wahyuni Astina³

Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Makassar
 (akhmad@unismuh.ac.id)

ABSTRACT

This study examines labor, government expenditure and economic growth in Enrekang Regency. The approach used in this study is a quantitative descriptive approach. The type of research used is a correlational research design that is to determine the relationship between independent variables and dependent variables. Population in this study is the entire community which includes a workforce of 9,588 people and a sample of 99 inhabitants. Methods of data collection by questionnaire research, field and literature. Methods of data analysis using multiple regression analysis. The results showed that labor is not significant to economic growth and government expenditure significant to economic growth in Enrekang Regency.

Keywords: *Labor, Government Expenditure, Economic Growth*

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji tentang tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah desain penelitian korelasional yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang termasuk angkatan kerja sebanyak 9.588 jiwa dan sampel berjumlah 99 penduduk. Metode pengumpulan data dengan penelitian angket, lapangan dan pustaka. Metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang.

Kata kunci : Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan di bidang ekonomi sangatlah penting karena dengan meningkatnya perekonomian maka akan meningkatkan sektor – sektor lainnya. Pembangunan ekonomi adalah salah satu tolak ukur dalam melihat peningkatan ekonomi, jika pembangunan ekonomi membaik maka peningkatan ekonomi di daerah tersebut semakin membaik, sedangkan jika pembangunan ekonomi di daerah menurun maka peningkatan ekonomi juga akan menurun.

Dalam upaya peningkatan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan tenaga kerja dengan diimbangi dengan menciptakan lapangan kerja karena jika tidak ada lapangan pekerjaan maka pengangguran akan meningkat. Pertumbuhan perekonomian juga tidak lepas dari peran pemerintah, Mangkoesubroto (2001) menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgravedimana mereka menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap- tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio-rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional-relatif besar.

Hal itu dikarenakan pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu posisi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetapi besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak kegagalan pasar yang ditimbulkan perkembangan ekonomi.

Menurut Todaro (2000) pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memegang peran yang lebih besar dan lebih menentukan di dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional atau daerah, hal ini yang memacu setiap pemerintah kabupaten/kota di Indonesia berlomba untuk memajukan perekonomian daerahnya agar tercapai masyarakat yang sejahtera di daerahnya dan setiap pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia memiliki berbagai program dalam memperbaiki perekonomian di daerahnya, salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Enrekang yang terus berupaya mengembangkan perekonomian.

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. Kondisi perekonomian suatu daerah/wilayah sangatlah tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki, serta kemampuan daerah tersebut untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam rangka pengembangan potensi daerah yang dimiliki tersebut pemerintah daerah Kabupaten Enrekang telah melakukan berbagai langkah, kebijakan dan upaya untuk dapat lebih meningkatkan perekonomian di daerah ini.

LANDASAN TEORI

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut ekonom Klasik, Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik. Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi. Persamaannya adalah :

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = tingkat pertambahan barang modal

ΔL = tingkat pertambahan tenaga kerja

ΔT = tingkat pertambahan teknologi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam menghitung pendapatan regional hanya dipakai konsep domestik. Berarti seluruh nilai tambah ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah atau region (propinsi atau kabupaten) dimasukkan tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksi. Dengan demikian PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan balas jasa atau pendapatan faktor-faktor produksi yang berpartisipasi dalam proses produksi tersebut.

Dalam penyajian PDRB selalu dibedakan atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. Adapun definisi PDRB berdasarkan harga konstan adalah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap. PDRB atas dasar harga konstan ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena nilainya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu atau tahun sekarang, ini digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

PDRB diperoleh dari produksi seluruh sektor perekonomian regional yang dijabarkan dalam 9 (Sembilan) sektor dan terakumulasi dalam 3 (tiga) kelompok menurut jenisnya, yaitu :

1. Kelompok primer, adalah sektor yang langsung menghasilkan barang jadi (final product). Terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalan.
2. Kelompok sekunder, adalah sektor yang dalam menghasilkan barang harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Terdiri dari sektor industry pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor bangunan.
3. Selanjutnya sektor tersier, adalah sektor yang bergerak dibidang pelayanan (jasa) yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa.

Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja dalam undang-undang No 13 tahun 2003 telah melengkapi pengertian tenaga kerja dalam undang-undang No 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok ketenagakerjaan yang memberikan yang pengertian bahwa yang tidak bekerja ataupun tidak mencari pekerjaan, mereka ini adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa. Atau dengan kata lain yang bukan angkata kerja dalah orang yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan.

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja, dimana angkatan kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang bekerja dan pencari kerja. Untuk lebih jelasnya pengertian angkatan kerja menurut beberapa ahli seperti husni (2006) yang memberikan definisi sebagai berikut: angkatan kerja adalah bagian dari penduduk (usia kerja) baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan (penganggur). Defenis ini mengandung makna bahwa angkatan kerja adalah semua penduduk yang telah mencapai usia kerja.

METODOLOGI PENELITIAN

Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk mendukung hasil dari analisa kuantitatif serta analisis untuk mengetahui keterkaitan hasil perhitungan dengan menggunakan teori-teori pendukung dan berhubungan dengan masalah yang diteliti yang bersumber dari berbagai literatur.

Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunaskan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu tingkat pendidikan, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah

terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan model analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 21. Adapun sumber data yang digunakan yaitu berasal dari kantor atau instansi yang terkait dengan permasalahan tersebut seperti, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Enrekang.

Metode Analisis

Untuk dapat merumuskan hasil penelitian dan sebagai penyelesaian untuk menentukan jawaban dari masalah yang diteliti, maka digunakan teknik analisis.

1. Analisis Regresi berganda

Regresi linear berganda didasarkan pada hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variable dependen. Persamaan umum regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e$$

Dimana:

\hat{Y} = Pertumbuhan ekonomi

b_1, b_2 = nilai koefisien regresi

X_1 = Tenaga kerja

X_2 = pengeluaran pemerintah

a = konstanta

e = standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	10,890	2,119		5,139	,000
	X1 (tenaga kerja)	,068	,117	,058	,579	,564
	X2 (pengeluaran pemerintah)	,376	,089	,422	4,226	,000
a. Dependent Variable: Y (pertumbuhan ekonomi)						

Dari tabel di atas dapat diperoleh rumus sebagai berikut : $Y = 10,890 + 0,068X_1 + 0,376X_2$. Dalam persamaan regresi di atas, nilai konstan (a) adalah sebesar 10,890 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel tenaga kerja (X_1) dan pengeluaran pemerintah (X_2) yang berpengaruh, maka pertumbuhan ekonomi (Y) yang terjadi pada pemerintahan Kabupaten Enrekang sebesar 10,890. Sedangkan hasil uji regresi berganda untuk variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai koefisien tenaga kerja untuk variabel X_1 sebesar 0,068 berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan tenaga kerja satu satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,068 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.
- Nilai koefisien pengeluaran pemerintah untuk variabel X_2 sebesar 0,376 berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah satu satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,376 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,890	2,119		5,139	,000
	X1 (tenaga kerja)	,068	,117	,058	,579	,564
	X2 (pengeluaran pemerintah)	,376	,089	,422	4,226	,000
Dependent Variable: Y (pertumbuhan ekonomi)						

a. Tenaga kerja (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y)

Tenaga Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi yang diperoleh $> 0,05$ dan hipotesis H_{a1} ditolak.

b. Peneluaran pemerintah (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y)

Pengeluaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi $< 0,05$ dan hipotesis H_{a2} diterima.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressi on	94,107	2	47,054	12,087	,000 ^b
	Residual	373,731	96	3,893		
	Total	467,838	98			
a. Dependent Variable: Y (pertumbuhan ekonomi)						
b. Predictors: (Constant), X2 (pengeluaran pemerintah), X1 (tenaga kerja)						

Pengujian secara simultan X1, dan X2 terhadap Y:

Dari tabel diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 12,087 dengan nilai probabilitas (sig)=0,000. Nilai nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,000 < 0,05$; maka H_{01} diterima, berarti secara bersama-sama (simultan) tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.9

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,44 ^a	,201	,185	1,973
a. Predictors: (Constant), X2 (pengeluaran pemerintah), X1 (tenaga kerja)				
b. Dependent Variable: Y (pertumbuhan ekonomi)				

Berdasarkan hasil uji determinasi tabel tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah 0.201. Angka koefisien determinasi menyatakan bahwa variabel tenaga kerja dan pengeluaran

pemerintah hanya dapat menjelaskan atau memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang sebesar 20,1%. Sedangkan sisanya sebesar 79,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB (atas dasar nilai konstan) yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibanding dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Penggunaan nilai PDRB atas dasar nilai konstan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi. Mulai perhitungan PDRB tahun 2004 berdasarkan rekomendasi PBB (perserikatan bangsa – bangsa) tahun dasar yang digunakan adalah harga tahun 2000 sehingga pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga konstan 2000 sebagai dasar. Tabel berikut menyajikan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi kabupaten Enrekang tahun 2004 – 2013.

Tabel perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten Enrekang tahun 2004 – 2013 **

No	Tahun	PDRB ADH berlaku (juta Rp)	perkembangan n	PDRB ADH konstan (juta Rp)	Pertumbuh an ekonomi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2004	725.067,18	14,29	545.882,61	5,34
2	2005	843.536,23	16,34	578.103,41	5,90
3	2006	961.572,33	13,99	599.946,01	3,78
4	2007	1.132.356,15	17,76	630.595,42	5,11
5	2008	1.347.211,53	18,97	671.543,20	6,49
6	2009	1.614.215,21	19,82	716.023,15	6,62
7	2010	1.921.408,85	19,03	751.806,72	5,00
8	2011	2.291.690,54	19,27	803.892,34	6,90
9	2012	2.680.809,01	16,73	861.339,60	7,18
10	2013	3.316.599,41	23,97	921.310,41	6,96
Rata rata		1.683.446,64	18,02	708.044,29	5,93

Sumber : bps Enrekang

Jika kita perhatikan 4.3 di atas, akan terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Enrekang, selama periode 2004 – 2013 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2004 perekonomian kabupaten Enrekang sekitar 5.43 persen, kemudian mengalami pertumbuhan hingga mencapai angka 5,90 persen pada tahun 2005. Namun demikian pada tahun 2006 sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yakni sekitar 3,78 persen, kemudian pada tahun 2007 kembali melaju dengan angka pertumbuhan sekitar 5,11 persen. Pada tahun 2008 perekonomian semakin menunjukkan kemajuan hingga mencapai angka 6,49 persen, dan tahun 2009, pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Enrekang adalah sekitar 6,62 persen. Kemudian pada tahun 2011 perekonomian Kabupaten Enrekang bergerak agak sedikit cepat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2010 ekonomi Kabupaten Enrekang hanya tumbuh sekitar 5,00 persen maka pada tahun 2011 tumbuh menjadi 6,90 persen. Selama periode tahun 2004 – 2013 pertumbuhan ekonomi yang tertinggi terjadi di Kabupaten enrekang terjadi pada tahun 2012, dengan pertumbuhan mencapai 7,18 persen.

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang

Selama periode 2007 – 2013, perekonomian Kabupaten Enrekang relatif sama bila kita bandingkan dengan perekonomian Sulawesi Selatan hanya empat tahun terakhir menunjukkan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan selalu lebih tinggi dari pertumbuhan Kabupaten Enrekang. Pada tahun 2007, ekonomi kabupaten enrekang tumbuh sekitar 5,11 persen, sedangkan level propensi hanya tumbuh 6,34 persen, dan pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi yang

berhasil dicapai Kabupaten Enrekang adalah sekitar 6,49 persen, sedangkan level propensi sulawesi Selatan tumbuh sekitar 7,78 persen.

Pahun 2009 pertumbuhan ekonomi kabupaten enrekang adalah sekitar 6,62 persen dan pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan 6,20 persen, pada tahun 2010 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi kabupaten enrekang yang hanya tumbuh sekitar 5,00 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan adalah sekitar 8.18 persen, kemudian pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi kabupaten enrekang meningkat sekitar 6,90 persen sedangkan propensi sulawesi selatan mengalami peningkatan 7,65 persen.

Tahun 2012, pertumbuhan ekonomi kabupaten enrekang kembali meningkat sekitar 7,18 persen demikian halnya propensi sulawesi selatan yang pertumbuhan ekonominya mencapai 8,37 persen. pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi yang dicapai kabupaten enrekang sedikit agak melambat dari tahun sebelumnya yakni sekitar 6,96 persen, dan hal serupa terjadi pada level propensi sulawesi selatan yang tahun sebelumnya pertumbuhan sekitar 8,37 persen dan pada tahun 2013 sedikit mengalami perlambatan menjadi sekitar 7,65 persen.

Ketenagakerjaan Kabupaten Enrekang

Tabel Statistik ketenagakerjaan Kabupaten enrekang

Uraian	2011	2012	2013
TPAK (%)	66,57	74,50	70,27
Tingkat penaganguran (%)	6,66	3,05	1,61
bekerja	93,34	96,95	98,39
Bekerja di sector			
Pertanian	69,62	70,60	65,16
Industri pengolahan	3,31	2,79	3,42
Perdagangan	8,05	8,72	8,58
Jasa – jasa	13,14	12,21	16,13
Lainnya	6,08	5,68	6,31

Total penduduk usia kerja di kabupaten enrekang pada tahun 2013 tercatat sekitar 70,27 % sedikit mengalami kontraksi dibanding tahun sebelumnya dimana

pada tahun 2012 penduduk usia kerja pada tahun tersebut di Kabupaten Enrekang tercatat sekitar 74,50 %. Kemudian jika kita tinjau dari tingkat pengangguran menunjukkan trend menurun dari tahun ketahun, dimana pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka tercatat sekitar 6,66 % dari penduduk usia kerja turun menjadi sekitar 3,05 % pada tahun 2012 dan turun lagi di tahun 2013 dimana tercatat pengangguran terbuka pada tahun tersebut tinggal sekitar 1,61 %, dan jika kita lihat data penduduk usia kerja yang bekerja cukup besar, dimana sekitar 98,39 % dari total penduduk usia kerja.

Grafik pekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Enrekang

Dari beberapa sektor lapangan usaha yang menjadi pilihan pekerjaan penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2013, ternyata sektor pertanian masih merupakan lapangan sektor bekerja dominan yang tercatat sekitar 65,16 %, disusul sektor jasa – jasa yang tercatat 16,13 %, kemudian penduduk Kabupaten Enrekang yang bekerja disektor perdagangan pada tahun 2013, tercatat sekitar 8,58% dari total penduduk usia kerja, dan yang bekerja pada sektor industri pengolahan tercatat sekitar 3,42% dan bekerja pada sektor lain – lainnya tercatat sekitar 6,31% dari total penduduk usia kerja pada tahun 2013.

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Enrekang

Menurut Budiono (1981) pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama, pembelian faktor-faktor produksi (input) dan pembelian produk (output). Kedua, untuk pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja rutin) serta untuk investasi pemerintah (belanja pembangunan/barang-barang modal). Pengeluaran pemerintah yang diukur dari pengeluaran rutin dan pembangunan mempunyai peranan dan fungsi cukup besar mendukung sasaran pembangunan dalam menunjang kegiatan pemerintah serta peningkatan jangkauan dan misi pelayanan yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi. Layaknya pengeluaran masyarakat maka pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat melalui *multiplier effect* dan selanjutnya akan meningkatkan produksi atau penawaran agregat sehingga PDRB akan meningkat.

Table Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Enrekang

Tahun	Belanja tidak langsung	Belanja langsung
2008	272.507.600.912,68	185.177.015.844,39
2009	272.507.600.912,68	185.177.015.844,39

2010	20.964.687.297	100.906.204.037
2011	280.194.687.429	235.592.873.880
2012	295.559.787.937	231.542.837.307.750
2013	357.342.280.454	232.052.364.850

Sumber : badan pengolaan daerah Kabupaten Enrekang

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil uji F pada penelitian ini, diketahui bahwa seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, jumlah tenaga kerja (X1), belum signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah (X2) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

2. Tenaga Kerja menunjukkan belum pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang, berarti bahwa tenaga kerja secara parsial belum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang artinya bahwa tidak ada berpengaruh positif dan signifikan antara tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang.
3. Hasil hipotesis telah membuktikan terhadap pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil ini berarti bahwa pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang artinya bahwa ada berpengaruh positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang.

Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang diharapkan agar pemerintah dapat lebih mengendalikan dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi berdasarkan faktor-faktor yang telah dibahas dalam penelitian ini yaitu tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah. Serta merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Enrekang juga harus memperhatikan pengeluarannya, karena semakin tinggi pengeluaran pemerintah Kabupaten Enrekang maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, artinya pengeluaran yang akan dikeluarkan harus lebih tepat sasaran.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari variabel yang lebih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain dari variabel tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, 2015. Dampak Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan pada Sepuluh Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Prosiding Seminar Nasional. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar.
- Akhmad, N.A., M. Achsani, Tambunan and S.A. Mulyo, 2012. Impact of Fiscal Policy on the Agricultural Development in an Emerging Economy: Case

- Study from the South Sulawesi, Indonesia. *International Research Journal of Finance and Economics*, 96: 101-112.
- Arsyad. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. STIE YKPN Yogyakarta
- Avanda. 2013. *Analisis Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah*. FE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Badan Pusat Statistik. *Kota Kabupaten enrekang Dalam Angka*. BPS Kota Kabupaten enrekang.
- Basri, F. 2002. *Perekonomian Indonesia, Tantangan Dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Erlangga, Surabaya
- Deddy. 2008. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*. FE UNDIP. Semarang.
- Dewi S. 2014. *Analisis jumlah tenagakerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara dari tahun 2001-2010*. FEB Univ. Sam Ratulangi. Manado
- Eddy. 2012. *Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam NEgeri (PMDN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2010*. FEB Universitas Brawijaya. Malang.
- Mangkoesubroto, G. 2001. *Ekonomi Publik*. edisi 3. Yogyakarta. BPFE.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mulyadi. 2008. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam perspektif pembangunan*. Rajawali Pers.
- Rostow, W.W. 1960. *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sayekti. 2009. *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur*. FE Universitas Darul'ulum Jombang.
- Sudarsono. 1995. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Cetakan ke-8. Jakarta: LP3ES.
- Sukirno. 1985. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukirno. 1994. *Pengantar Makroekonomi*. Edisi kedua. Jakarta : Rajawali press.

- Sukirno. 2000. *Makroekonomi Modern*. Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru. Raja Grafindo Pustaka.
- Sukirno. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar kebijakan*. Kencana. Jakarta
- Suparmoko.2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*.Edisi pertama.Yogyakarta .
- Suroto., 1992.*Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*.Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Tambunan.2001. *Perekonomian Indonesia: teori dan Temuan empiris*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Todaro Michael 2000.*Pembangunan Ekonomi di dunia ketiga*.Jilid 2. Pentranslit Munandar. Erlangga. Jakarta.
- Undang – undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- Undang – undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- Widarjono Agus. 2007. *Ekonometrika :Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi kedua. Ekonisia FE-UII. Ygyakarta
- Widodo T.2006. *Perencanaan Pembangunan*. UPP STIM YKPM.
- William N Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi 2. Universitas Gajah Mada